



KEPUTUSAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA  
NOMOR MILTAMA/KEP/ 02 /II/2023

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MILITER UTAMA SEBAGAI HAKIM PENGAWAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

- Menimbang : a. Bahwa pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen guna untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka pengawasan, maka perlu ditunjuk Hakim Militer Utama Pengawas Daerah di Lingkungan Peradilan Militer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 tentang Tugas Pengawasan Wakil Ketua di bantu Hakim;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 96 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Dalam Melaksanakan Pengawasan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan;
10. Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial Nomor 47/KMASKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/O.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
11. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang di bawahnya;
12. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.


#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MILITER UTAMA SEBAGAI HAKIM PENGAWAS DAERAH DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Hakim Militer Utama yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Daerah di Lingkungan Peradilan Militer.
- Kedua : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 02 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.  
Marsekal Muda TNI

Salinan keputusan disampaikan kepada Yth :

1. YM. Ketua Kamar Pembinaan MA RI;
  2. YM. Ketua Kamar Pengawasan MA RI;
  3. Sekretaris MA RI;
  4. Dirjen Badilmiltun MA RI;
  5. Para Hakim Militer Utama;
  6. Kadilmilti I Medan s.d. III Surabaya;
  7. Kadilmil I-01 Banda Aceh s.d. III-19 Jayapura.
-

PENGADILAN MILITER UTAMA

Lampiran Keputusan  
Kepala Pengadilan Militer Utama  
Nomor : MILTAMA/KEP/ 02 /II/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**PENUNJUKAN HAKIM MILITER UTAMA SEBAGAI HAKIM PENGAWAS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. Marsekal Muda TNI	Kadilmiltama	Penanggung Jawab
2.	Apel Ginting, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI	Wakadilmiltama	Koordinator Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Wilayah Dilmilti II Jakarta
3.	Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. Laksamana Pertama TNI	Hakim Militer Utama	Hakim Pengawas pada Wilayah Dilmilti I Medan
4.	Marwan Suliandi, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI	Hakim Militer Utama	Hakim Pengawas pada Wilayah Dilmilti III Surabaya

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.  
Marsekal Muda TNI